



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026**

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KOTA YOGYAKARTA

2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi. Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan good governance. Sementara itu dalam lingkup lokal Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain masih terjadinya “kesimpangsiuran informasi” dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di Pemerintah Kota Yogyakarta. Di bidang regulasi, masih diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informasi baik dari aspek infrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan iklim usaha dan memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi

pemerataan informasi. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informasi, statistik dan persandian.

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
- 8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 10) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 12) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022
- 13) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
- 15) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta,
- 16) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022
- 17) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
- 18) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2021 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

1.3.Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam kurun waktu

tahun 2023 - 2026 mendatang sebagai implementasi visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 ini yaitu :

- 1) Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi Pemerintah Kota Yogyakarta
- 2) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam jangka menengah
- 3) Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah
- 4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang komunikasi dan informatika yang merupakan urusan wajib
- 6) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Hambatan-Hambatan Utama yang Dihadapi dan Perlu Diatasi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2021 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

2.1.1. Tugas

Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a) pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
- c) pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;

- d) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- e) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi dan statistik;
- f) pemberian rekomendasi teknis di bidang pengembangan dan pembangunan sistem informasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- g) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur telematika;
- h) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan persandian dan telekomunikasi;
- i) pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan informasi;
- j) pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian telematika;
- k) pengoordinasian penyelenggaraan monitoring dan evaluasi konten reklame;
- l) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
- m) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- n) pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- o) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- p) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- q) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- r) pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- t) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

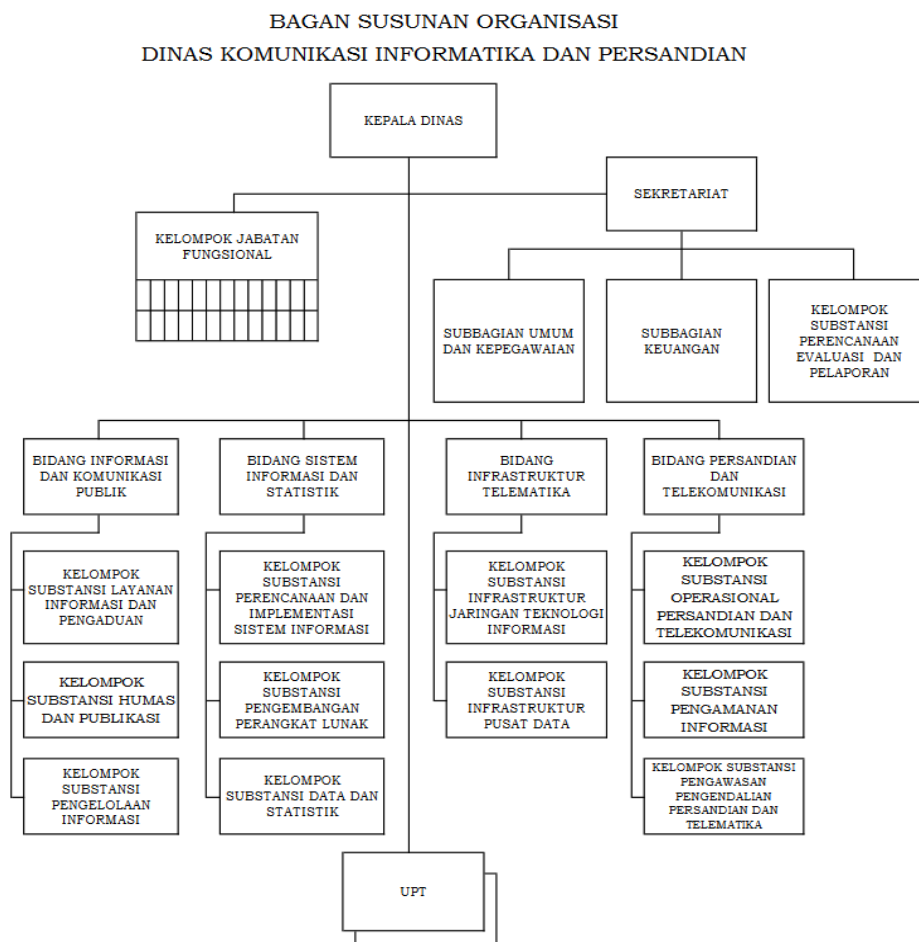
2.1.3. Struktur Organisasi

- a. Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari
 - 1) Kelompok Substansi Layanan Informasi dan Pengaduan;
 - 2) Kelompok Substansi Humas dan Publikasi, dan
 - 3) Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi
- d. Bidang Sistem Informasi dan Statistik, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Substansi Perencanaan dan Implementasi Sistem Informasi;
 - 2) Kelompok Substansi Pengembangan Perangkat Lunak; dan
 - 3) Kelompok Substansi Data dan Statistik
- e. Bidang Infrastruktur Telematika, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Substansi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi; dan
 - 2) Kelompok Substansi Infrastruktur Pusat Data
- f. Bidang Persandian dan Telekomunikasi, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Substansi Operasional Persandian dan Telekomunikasi;
 - 2) Kelompok Substansi Pengamanan Informasi; dan
 - 3) Kelompok Substansi Pengawasan Pengendalian Persandian dan Telematika
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Secara skematis untuk Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dituangkan dalam skema sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

2.2.1. Kepegawaian

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 62 orang PNS, Tenaga Teknis sebanyak 40 orang yang dituangkan dalam tabel berikut :

Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan Eselon :

Eselon	Jumlah
II	1
III	5
IV	13
Non Eselon	43

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jabatan	Golongan Ruang	Jumlah (orang)
Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	1
Sekretaris	Pembina, IV/a	1
Kepala Bidang	Pembina, IV/a,	3
	Penata Tk. I, III/d	1
Kepala Seksi	Penata Tk. I, III/d	6
	Penata, III/c	4
Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I, III/d	3
Staf	Penata Tk. I, III/d	1
	Penata III/c	1
	Penata Muda Tk I, III/b	3
	Penata Muda, III/a	9
	Pengatur Tk. I, II/d	1
	Pengatur, II/c	6
Jabatan Fungsional	Pranata Komputer	15
	Pranata Humas	2
	Sandiman	3
	Analisis Kepegawaian	1
	Statistisi	1

Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah personil
1	S2	9
2	S1	28
3	D IV	1
4	D III	16
5	SMA	8
	Jumlah	62

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui profil pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Tingkat Pendidikan paling tinggi adalah S2 dengan jumlah pegawai 9 orang, paling rendah adalah lulusan SMA sejumlah 8 orang, sedangkan jumlah lulusan S1 sejumlah 28 orang.

2.2.2. Perlengkapan

Asset perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berupa sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Kominfo dan Persandian

No	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	Kendaraan Roda Empat	6
2.	Kendaraan Roda Dua	16
3.	Ruang Rapat	3
4.	Komputer	168
5.	Printer	37
6.	Notebook	36
7.	Telepon	385
8.	Mesin Faximile	3
9.	Meja Kerja	141
10.	Kursi Kerja	180
11.	Meja Rapat	24
12.	Kursi Rapat	111
13.	Almari	27
14.	Filing Kabinet	28
15.	Laptop /notebook	40
16.	AC	33
17.	Acces Point	313
18.	Swicth	314
19.	UPS	188
20.	Server	87
21.	Tiang FO	791
22.	CCTV	264
23.	Buku Perpustakaan	237
24.	Air Purifier	4
25.	Alat Pemetong Kertas	1
26.	Alat Pengukur ketinggian	1
27.	Alat pengukur radiasi	1
29.	Amplifier	5
29.	Brankas	1
30.	Box Switch	4
31.	Bracket TV	12
32.	Kamera	18
33.	Kipas Angin	8
34.	PABX	43
35.	Mesin Ketik	5
36.	LAN	6
37.	LCD Projector	13
38.	White board	13
39.	Gedung Kantor	2

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kapasitasnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika yang memiliki target sasaran dan program untuk

mendukung kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ada 2 (dua) indikator sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yaitu Indeks layanan Informasi Publik dan Indeks Pengamanan Informasi, dimana kedua indikator sasaran dapat mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta pada periode renstra sebelumnya (2017-2022) menunjukkan tingkat capaian kinerja yang baik. Selain itu, pada pencapaian indikator program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian juga dapat mencapai target yang telah ditentukan yang dapat terlihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra PD						Realisasi Capaian					Rasio Capaian Realisasi				
	NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Indikator Sasaran :																			
Indeks Layanan Informasi Publik				61,98	67,24	72,21	74,00	87,91	90,98	62,38	67,45	75,18	82,96	89,09	101%	100%	104%	112%	101%
Indeks pengamanan informasi				75,70	78,40	81,40	84,40	88,00	94,00	75,70	79,26	81,40	84,4	88,00	100%	101%	100%	100%	100%
Indikator Program :																			
Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam				94,00%	95,00%	95,50%	96,00%	96,50%	97,00%	96,00%	93,76%	95,49%	97,61%	98,14%	102,13%	98,69%	99,98%	101,68%	101,70%
Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik				19,93%	30,43%	40,93%	40,93%	67,96%	71,93%	19,93%	32,00%	43,22%	56,26%	71%	100,00%	105,16%	105,59%	137,46%	104,31%
Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun				57,32%	63,69%	69,43%	75,16%	94,08%	100,00%	57,32%	63,69%	77,07%	88,54%	94,08%	100,00%	100,00%	111,00%	117,80%	100,00%
Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi				-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100,00%	100,00%

Persentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi				-	-	-	-	90%	95%	-	-	-	-	85,71%	-	-	-	-	95,23%
Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah				-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pengamanan informasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101,70%	100%	100%	100%	100%	101,70%	100%	100%	100%
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi				19%	28%	38%	38%	60%	80%	19%	26,90%	38%	38%	60%	19%	26,90%	38%	38%	60%

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Program PD (Program Berdasarkan RPJMD 2017-2022)	Program PD (Program Berdasarkan Permendagri 90 Th 2019)	Program PD (Program berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020)	Anggaran (Rp)					Target Program 2022	Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio Capaian Realisasi Anggaran				
			2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.327.447.242	1.478.546.030	1.517.524.100	1.079.225.640	3.904.343.200	2.902.219.246	1.263.009.000	1.450.495.930	1.501.649.938	1.054.903.939	3.689.350.559,80	95,15%	98,10%	98,95%	97,75%	94,49%
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	13.044.563.264	15.511.497.487	14.684.585.048	7.957.284.900	13.421.278.610	14.166.430.452	12.523.203.016	14.834.792.311	13.814.368.142	7.412.800.761	12.599.876.867	96,00%	95,64%	94,07%	93,16%	93,88%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.722.743.714	1.889.225.306	2.360.619.000	1.164.992.080	165.682.200	180.014.304	1.661.779.420	1.844.991.925	2.343.143.178	1.140.600.345	158.322.020	96,46%	97,66%	99,26%	97,91%	95,56%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	844.854.450	1.374.495.600	1.641.129.000	1.419.064.000	780.838.070	328.980.710	803.320.736	1.233.486.243	1.595.224.975	1.595.224.975	773.468.000	95,08%	89,74%	97,20%	112,41%	99,06%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	866.227.020	1.264.711.176	1.361.262.000	864.375.930	9.624.683.491	10.740.328.686	763.426.864	1.101.511.717	1.244.526.522	753.712.203,50	8.995.511.351,20	88,13%	87,10%	91,42%	87,20%	93,46%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			242.669.400	220.401.871	341.694.000	151.546.000			167.026.763	157.467.421	261.753.012	139.913.651,15		68,83%	71,45%	76,60%	92,32%	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			48.500.000	54.000.000	87.000.000	-			38.250.000	40.590.000	85.760.000	-		78,87%	75,17%	98,57%	-	
PROGRAM PEBINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			71.728.000	2.220.000	30.833.620	600.000			65.424.500	739.500	30.794.142	600.000,00		91,21%	33,31%	99,87%	100,00%	
TOTAL ANGGARAN			18.168.733.090	21.795.097.470	22.284.327.768	12.637.088.550	27.896.825.571	28.317.973.398	17.285.440.299	20.664.075.047	21.147.001.139	12.097.755.875	26.216.528.798					

2.4. Hambatan-Hambatan Utama yang Dihadapi dan Perlu Diatasi

Pelaksanaan renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian periode sebelumnya telah berjalan sesuai dengan perencanaan, namun ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan renstra di periode sebelumnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam pelaksanaan renstra periode sebelumnya antara lain:

- 1) Belum semua petugas lapangan pengaduan JSS merespon dengan cepat pengaduan masyarakat yang diterima.
- 2) Pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak rasionalisasi anggaran di seluruh program kegiatan.
- 3) Ketebatasan sarana dan prasarana pengamanan informasi.
- 4) Penyedia menara dan fober optik dalam melaksanakan pekerjaan sering menyerahkan sepenuhnya kepada kontraktor yang sebagian diantaranya tidak memahami aturan terkait perizinan menara telekomunikasi dan fiber optik di Kota Yogyakarta sehingga mengabaikan aturan perundang-undangan dimaksud serta belum semua penyedia infastruktur telekomunikasi menara telekomunikasi dan Fiber Optik mempunyai kesadaran untuk mengurus proses perizinan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informasi dan persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Dalam lingkup lokal Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain masih terjadinya “kesimpangsiuran informasi” dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di Pemerintah Kota Yogyakarta. Di bidang regulasi, masih diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informasi baik dari aspek infrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan iklim usaha dan memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi pemerataan informasi.

Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e- government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur

dan sumber daya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah. Seiring sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan mendasarkan pada Peraturan Walikota Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2021 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, maka Dinas Kominfo dan Persandian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik serta mempunyai 12 (dua belas) fungsi dalam penyelenggaraan tugasnya.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan program kegiatan yang diampu adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PERMASALAHAN
1	Program Informasi dan Pelayanan Publik	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Beberapa program Pemerintah Kota belum terinformasi atau tersosialisasikan kepada masyarakat secara optimal
		Masih rendahnya kesadaran OPD dalam pengelolaan informasi melalui kanal digital yang ada
		Masih kurangnya respon OPD dalam menanggapi aduan masyarakat
2	Program Aplikasi Informatika	

	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masih adanya nama domain yang tidak merepresentasikan konten atau layanan yang disediakan
		Belum terpenuhinya secara menyeluruh perangkat jaringan yang sesuai dengan standar jaringan komputer organisasi berskala besar (enterprise)
		Pengelolaan aset infrastruktur belum dilaksanakan dengan baik
		Belum tersedianya dokumen pengelolaan infrastruktur yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Proses bisnis dan data yang belum terintegrasi antar OPD
		Regulasi layanan informasi berbasis digital masih kurang
		Beberapa OPD yang tidak memiliki pengembangan sistem melaksanakan pengembangan sistem tanpa melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfosan
		Pengembangan aplikasi masih menitikberatkan pada aplikasi operasional bukan pada aplikasi data analitik atau <i>Decision Support System</i> (DSS)
		Pengembangan sistem sebagai pendukung keputusan belum optimal
		Tidak berimbang antara kebutuhan pengembangan sistem dengan

		ketersediaan sumber daya (anggaran dan SDM)
		Banyaknya permintaan OPD yang belum tercantum dalam roadmap SPBE maupun <i>smart city</i>
		Belum tersedianya standarisasi dokumen pendukung implementasi SPBE
		Kebijakan pemerintah pusat untuk mewajibkan untuk memanfaatkan pusat data nasional
		Kewajiban daerah untuk menerapkan standarisasi pusat data yang dimiliki sesuai dengan SNI
		Kebijakan pemerintah pusat untuk penggunaan aplikasi generik
		<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya informasi terkait renovasi atau perbaikan gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta berkaitan dengan ketersediaan jaringan telpon dan internet di dalam gedung - Kurangnya komitmen penanggung jawab pelaksana renovasi gedung berkaitan dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan
		Belum adanya cross program dalam Pemerintah Kota untuk penguatan ekosistem digital
		Penataan infrastruktur pasif di Kota Yogyakarta belum optimal
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Belum adanya pedoman dalam verifikasi data oleh wali data
		Belum adanya kebijakan yang jelas terkait semua data dari OPD harus melalui atau sepengetahuan wali data sebelum dikirim ke Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga
		Belum adanya kebijakan mengenai SOP pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data
		Standarisasi data dan tipe data yang belum lengkap
		Belum adanya regulasi sebagai dasar pelaksanaan Perpres satu data di Kota Yogyakarta
		Masih kurangnya kesadaran OPD dalam pengelolaan data
		Kompetensi SDM dalam pengelolaan big data perlu ditingkatkan
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditariknya peralatan kontra penginderaan oleh BSSN
		Belum adanya regulasi terkait manajemen resiko keamanan informasi
		Belum adanya regulasi terkait audit internal keamanan TI
		Belum adanya personil yang menguasai data <i>science</i>
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi	Kurangnya kesadaran keamanan informasi bagi personil JKS di Pemkot

	Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Yogyakarta karena sering terjadi pergantian personil
		Masih bergantungnya peralatan persandian dengan BSSN

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah:

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan *smart city* di Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Optimalisasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Implementasi data *driven-government*;
4. Standarisasi pusat data Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif perangkat telekomunikasi
7. Penguatan keamanan data dan informasi Pemerintah Kota Yogyakarta;
8. Pengembangan ekosistem digital di Kota Yogyakarta;
9. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat;
10. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
11. Pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang menguasai teknologi informasi;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dalam upaya menuju tercapainya Visi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan” dan mendukung Sasaran Daerah ke 8 yaitu “ Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan” serta mendukung Misi ke 6 yaitu “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum”, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam table 4.1. berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	87.10	89.91	92.72	95.53
2	Meningkatnya Keamanan Informasi	Keamanan Informasi Meningkat	Indeks Pengamanan Informasi	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam RPD 2023-2026, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik
2. Peningkatan komunikasi publik
3. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika
4. Peningkatan pelayanan persandian

Berdasarkan strategi tersebut diatas, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Layanan Informasi Publik Meningkatkan Keamanan Informasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Meningkatnya Komunikasi publik	Melaksanakan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
			Melaksanakan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Tersedianya Layanan Hubungan Media
			Menyediakan Pelayanan Informasi Publik dan meningkatnya kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
		Pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika meningkat	Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
			Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

		Mengelola Pusat Data Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi teknologi informasi	Melaksanakan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Melaksanakan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik
	Meningkatnya layanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
		Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas
		Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	Meningkatnya pemanfaatan informasi data statistik	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral
Meningkatnya Keamanan Informasi	Meningkatnya layanan persandian untuk pengamanan informasi	Melaksanakan Keamanan Informasi Pemerintahan Kota Berbasis Elektronik
		Menyediakan Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Melaksanakan Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Tabel 6.1 pada halaman berikutnya.

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya Layanan Informasi Publik				Indeks Layanan Informasi Publik	84.19 Skala 0-100	87.10 Skala 0-100		89.91 Skala 0-100		92.72 Skala 0-100		95.53 Skala 0-100		0 Skala 0-100		95.53 Skala 0-100			
	Meningkatnya Layanan Informasi Publik			Indeks Layanan Informasi Publik	84.19 Skala 0-100	87.10 Skala 0-100		89.91 Skala 0-100		92.72 Skala 0-100		95.53 Skala 0-100		0 Skala 0-100		95.53 Skala 0-100			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah : analisis media cetak, analisis media online, analisis media sosial, dan penyusunan IKM survei persepsi	0 dokumen	4 dokumen	218,880,000	4 dokumen	218,880,000	4 dokumen	218,880,000	4 dokumen	218,880,000	0 dokumen	0	4 dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Layanan Hubungan Media	0 dokumen	14 dokumen	2,212,102,006	14 dokumen	2,212,102,006	14 dokumen	2,212,102,006	14 dokumen	2,212,102,006	0 dokumen	0	14 dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik dan sumber daya komunikasi publik yang meningkat.	0 dokumen	4 dokumen	471,237,240	4 dokumen	471,237,240	4 dokumen	471,237,240	4 dokumen	471,237,240	0 dokumen	0	4 dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0 unit	5 unit	4,802,347,750	5 unit	4,802,347,750	5 unit	4,802,347,750	5 unit	4,802,347,750	0 unit	0	5 unit	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 dokumen	2 dokumen	289,200,000	2 dokumen	289,200,000	2 dokumen	289,200,000	2 dokumen	289,200,000	0 dokumen	0	2 dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	0 unit	1 unit	6,760,271,840	1 unit	6,760,271,840	1 unit	6,760,271,840	1 unit	6,760,271,840	0 unit	0	1 unit	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0 dokumen	1 dokumen	283,476,120	1 dokumen	283,476,120	1 dokumen	283,476,120	1 dokumen	283,476,120	0 dokumen	0	1 dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	0 unit	20 unit	1,019,304,800	20 unit	1,019,304,800	20 unit	1,019,304,800	20 unit	1,019,304,800	0 unit	0	20 unit	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0 dokumen	3 dokumen	639,425,000	3 dokumen	639,425,000	3 dokumen	639,425,000	3 dokumen	639,425,000	0 dokumen	0	3 dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah laporan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas	0 dokumen	1 dokumen	165,122,400	1 dokumen	165,122,400	1 dokumen	165,122,400	1 dokumen	165,122,400	0 dokumen	0	1 dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0 layanan	4 layanan	207,282,542	4 layanan	207,282,542	4 layanan	207,282,542	4 layanan	207,282,542	0 layanan	0	4 layanan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Meningkatnya Layanan Informasi Publik				Indeks Layanan Informasi Publik	84.19 Skala 0-100	87.10 Skala 0-100		89.91 Skala 0-100		92.72 Skala 0-100		95.53 Skala 0-100		0 Skala 0-100		95.53 Skala 0-100			
	Meningkatnya Layanan Informasi Publik			Indeks Layanan Informasi Publik	84.19 Skala 0-100	87.10 Skala 0-100		89.91 Skala 0-100		92.72 Skala 0-100		95.53 Skala 0-100		0 Skala 0-100		95.53 Skala 0-100			

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral	0 dokumen	6 dokumen	180,014,304	6 dokumen	180,014,304	6 dokumen	180,014,304	6 dokumen	180,014,304	0 dokumen	0	6 dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Meningkatnya Keamanan Informasi				Indeks Pengamanan Informasi	94 Skala 0-100	100 Skala 0-100		100 Skala 0-100		100 Skala 0-100		100 Skala 0-100		0 Skala 0-100		100 Skala 0-100			
	Meningkatnya Keamanan Informasi			Indeks Pengamanan Informasi	94 Skala 0-100	100 Skala 0-100		100 Skala 0-100		100 Skala 0-100		100 Skala 0-100		0 Skala 0-100		100 Skala 0-100			
				Jumlah laporan keamanan informasi	0 dokumen	12 dokumen	272,340,000	12 dokumen	272,340,000	12 dokumen	272,340,000	12 dokumen	272,340,000	0 dokumen	0	12 dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	0 perangkat daerah	1 perangkat daerah	8,580,542	1 perangkat daerah	8,580,542	1 perangkat daerah	8,580,542	1 perangkat daerah	8,580,542	0 perangkat daerah	0	1 perangkat daerah	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	0 perangkat daerah	42 perangkat daerah	48,060,168	42 perangkat daerah	48,060,168	42 perangkat daerah	48,060,168	42 perangkat daerah	48,060,168	0 perangkat daerah	0	42 perangkat daerah	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian				Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	78,02 poin	80 poin		82 poin		84 poin		86 poin		0 poin		86 poin			
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	78.02 poin	80 poin		82 poin		84 poin		86 poin		0 poin		86 poin			
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0 dokumen	7 dokumen	12,120,000	7 dokumen	12,120,000	7 dokumen	12,120,000	7 dokumen	12,120,000	0 dokumen	0	7 dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	0 laporan	7 laporan	9,692,149,516	7 laporan	9,692,149,516	7 laporan	9,692,149,516	7 laporan	9,692,149,516	0 laporan	0	7 laporan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah	0 laporan	6 laporan	3,060,000	6 laporan	3,060,000	6 laporan	3,060,000	6 laporan	3,060,000	0 laporan	0	6 laporan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0 laporan	36 laporan	4,860,000	36 laporan	4,860,000	36 laporan	4,860,000	36 laporan	4,860,000	0 laporan	0	36 laporan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	0 laporan	6 laporan	389,891,146	6 laporan	389,891,146	6 laporan	389,891,146	6 laporan	389,891,146	0 laporan	0	6 laporan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah pengadaan barang milik daerah	0 unit	9 unit	15,000,000	9 unit	15,000,000	9 unit	15,000,000	9 unit	15,000,000	0 unit	0	9 unit	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	0 laporan	4 laporan	518,685,906	4 laporan	540,135,186	4 laporan	562,656,926	4 laporan	586,304,753	0 laporan	0	4 laporan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	0 unit	52 unit	147,910,000	52 unit	147,910,000	52 unit	147,910,000	52 unit	147,910,000	0 unit	0	52 unit	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 terutama Target dan Sasaran Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 seperti tersebut dalam Tabel 7.1. berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Layanan Informasi Publik	84.19	87,10	89.91	92.72	95,53	95,53
	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	97.00%	97.25%	97.50%	97.75%	98.00%	98.00%
	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	56.09%	62,33%	68,11%	73,89%	79,67%	79,67%
	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	68%	75,90%	83,94%	91,97%	100%	100%
	Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	ekosistem kota cerdas						
	Persentase pemanfaatan informasi data statistik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Keamanan Informasi	94.00	100	100	100	100	100
	Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2022 – 2026 adalah dokumen dan bagian dari rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam dokumen masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Demikian Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dan diketahui pula oleh stakeholder.